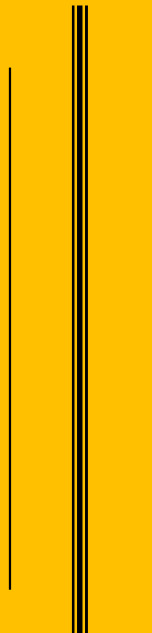


**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR SINGKAWANG**



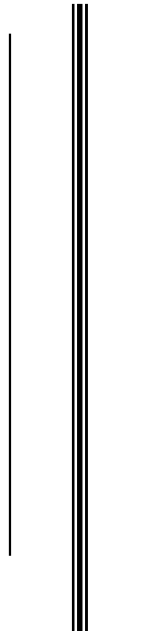
**RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG
TAHUN 2025-2029**



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR SINGKAWANG**



**RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG
TAHUN 2025-2029**



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG
NOMOR: KEP/ 23 /IX/2025 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2025



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG

Nomor: Kep/ 23 /IX/2025

tentang

RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG
TAHUN 2025-2029

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Kepolisian Resor Singkawang, maka disusun Rencana Strategis Kepolisian Resor Singkawang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/814/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Grand Strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/778/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/285/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

- Memperhatikan: 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG TENTANG RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG TAHUN 2025-2029.

1. Rencana Strategis Kepolisian Resor Singkawang Tahun 2025-2029 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. Rencana Strategis Kepolisian Resor Singkawang dimaksud, berlaku untuk seluruh jajaran Kepolisian Resor Singkawang, untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Strategis;
3. Rencana Strategis Kepolisian Resor Singkawang menjadi dasar penjabaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) jajaran Kepolisian Resor Singkawang;
4. hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri;
5. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Singkawang

pada tanggal: 25 September 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG POLDA KALBAR

**RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN
RESOR SINGKAWANG
TAHUN 2025-2029**

A. PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

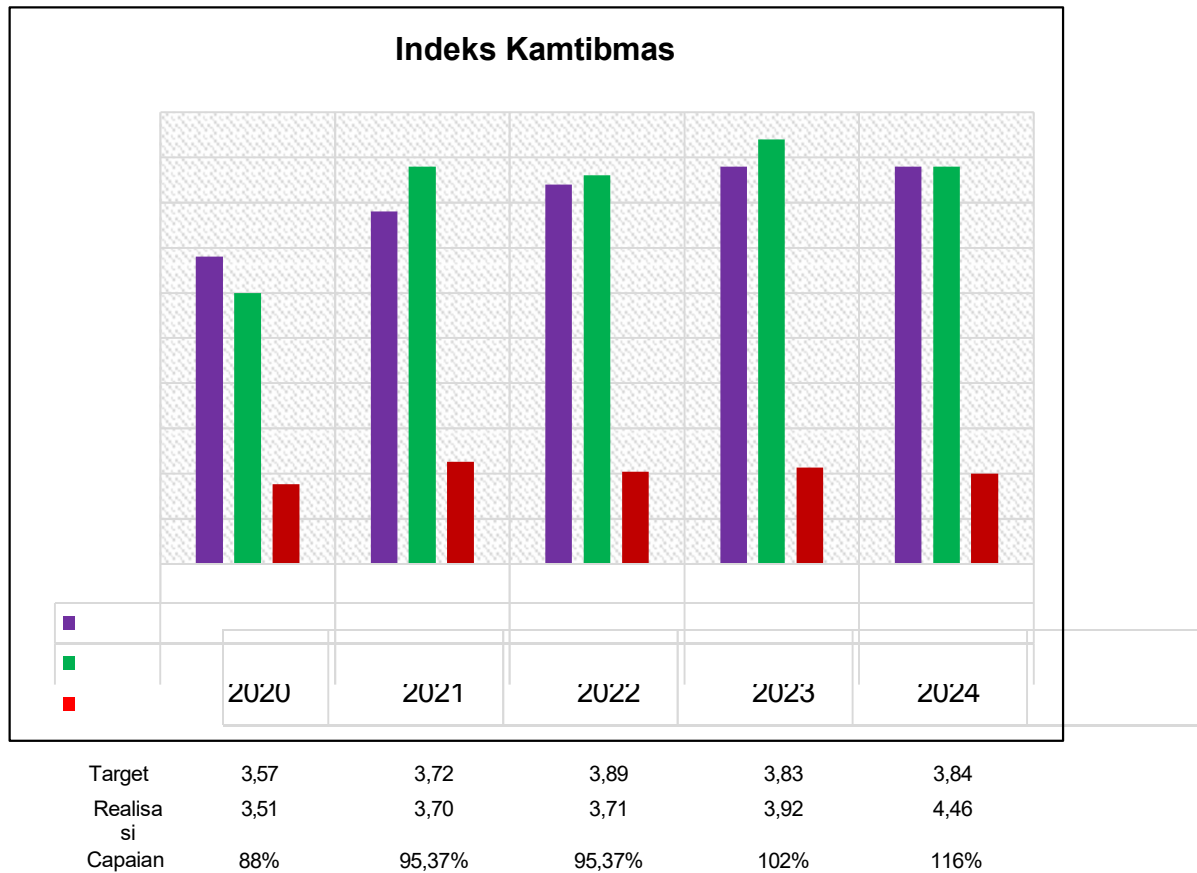
Kondisi umum menjelaskan hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Selain itu, kondisi umum menggambarkan aspirasi masyarakat dalam pemenuhan layanan dan regulasi yang dilakukan oleh Polres Singkawang. Evaluasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Kepolisian Resor Singkawang (Polres Singkawang) tahun 2020-2024.

Kinerja Polres Singkawang pada periode 2020-2024 menjadi acuan bagi rencana strategis (Renstra) Polres Singkawang pada periode 2025-2029. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, kinerja Polri akan digambarkan dalam empat aspek utama yaitu, Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), Indeks penegakan hukum (Gakkum), dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan Polri bagi masyarakat luas.

Pertama, indeks keamanan dan ketertiban masyarakat mencerminkan kinerja Polri dalam memberikan jaminan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri. Kinerja ini akan berdampak pada kontribusi Polri pada pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam). Kinerja Indeks Kamtibmas masyarakat cenderung mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut, dikarenakan capaian kinerja pada indeks Harkamtibmas dan indeks Gakkum cenderung mengalami penurunan kinerja meskipun telah

mencapai...

mencapai target sepanjang periode 2020-2024. Hal ini disebabkan karena indeks Kamtibmas terhubung secara linier dan berjenjang pada setiap komponen yang ada di dalam indeks Harkamtibmas dan indeks Gakkum



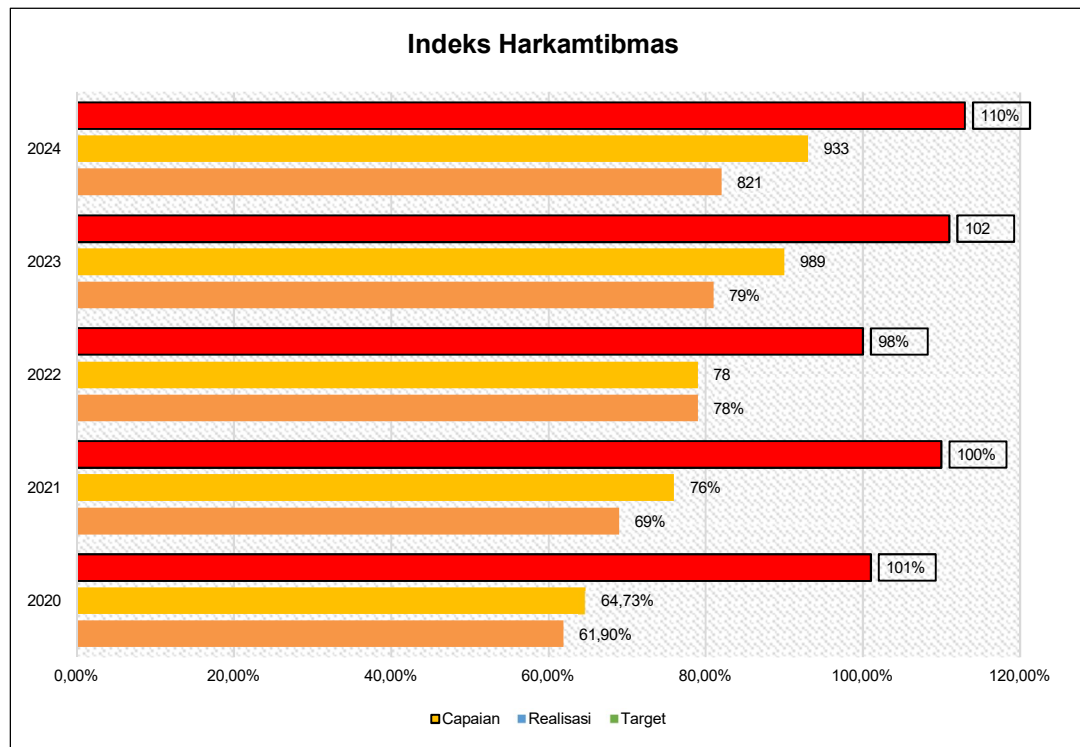
Grafik 1. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020-2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Kamtibmas mendapatkan nilai melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi penurunan realisasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2024. Hal ini dimungkinkan terjadi karena target yang ditetapkan cenderung lebih rendah dibandingkan kemampuan yang dimiliki Polri. Keberhasilan Polri dalam mewujudkan kondisi Kamtibmas yang aman dan kondusif, didukung oleh beberapa program/kegiatan yang dilakukan Polres Singkawang, di antaranya: (1) melakukan imbauan disiplin pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas; 2) mengimplementasikan strategi Bhabinkamtibmas melalui desa sentuhan, desa pantauan dan desa binaan serta meningkatkan jumlah FKPM/Pokdar; (3) meningkatkan *respon time* kehadiran Polri di TKP; (5) pengamanan objek vital dan target rentan; (7) reduksi potensi gangguan; (8) crime rate.

Sepanjang

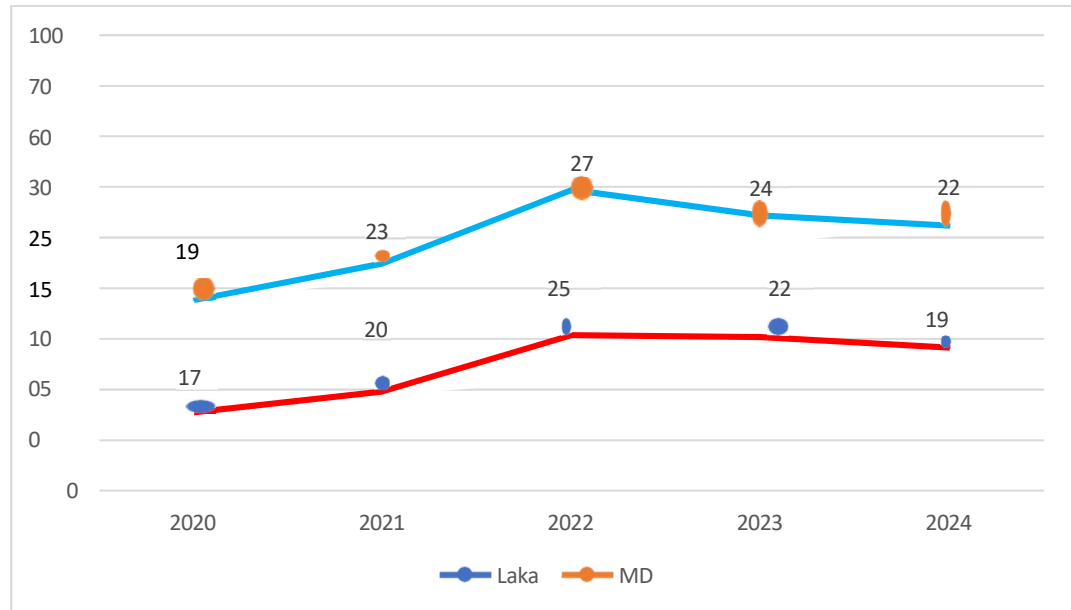
Sepanjang periode 2020-2024, Polres Singkawang telah berhasil menjaga situasi Kamtibmas tepat kondusif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Selain itu, pada tahun 2020 juga Polres Singkawang berhasil mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, mengendalikan aksi unjuk rasa terhadap protes *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja dan menjaga stabilitas keamanan secara umum. Pada 2021, Polri berhasil menurunkan gangguan Kamtibmas dengan pendekatan kemitraan melalui peran aktif Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda melalui kegiatan seperti sistem keamanan lingkungan (Siskamling), patroli dialogis, dan problem *solving* untuk mencegah gangguan Kamtibmas. Peran tersebut didukung dan dipertegas dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas. Pada tahun 2022, Polri terus memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, serta mendorong masyarakat berkolaborasi dalam menciptakan suasana yang kondusif di berbagai daerah. Pada 2023-2024, Polres Singkawang berhasil menjaga kondisi dan situasi Kamtibmas tepat kondusif di seluruh Kota Singkawang melalui Operasi Mantap Brata 2023-2024 untuk memastikan kondisi tetap kondusif menjelang dan selama periode pemilihan umum.

Kedua, kondisi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat mencerminkan kinerja Polda Kalbar dalam melakukan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Kinerja ini diukur dari 10 indikator kinerja yang menjadi pembentuk indeks Harkamtibmas, dimana kinerja Indeks Harkamtibmas telah mencapai target sepanjang periode 2020-2024 meskipun pada periode yang sama juga cenderung mengalami penurunan berturut-turut karena sebagian besar kinerja indikator pembentuk Indeks Harkamtibmas berada pada rentang 90–100%.



Grafik 2. Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020-2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Harkamtibmas mendapatkan nilai melebihi target, meskipun terjadi penurunan realisasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2024. Hal ini dimungkinkan terjadi karena target yang ditetapkan cenderung lebih rendah dibandingkan kemampuan yang dimiliki Polri. Penurunan kinerja indeks Harkamtibmas disebabkan karena kinerja *Road Safety Index*, di mana peningkatan jumlah kendaraan bermotor dibanding tahun 2023 dari 3.180.809 unit menjadi 3.377.294 unit pada tahun 2024 atau naik sebanyak 196.485 unit (5,8%) dan populasi penduduk Kalbar sebesar 1,22% (data Kalbar dalam angka tahun 2024-2025) berkontribusi meningkatkan jumlah laka. Kondisi ini menunjukkan bahwa berkendara di jalan raya menjadi tidak aman disebabkan karena jumlah Laka lintas dan korban yang meninggal dunia meningkat dengan signifikan khususnya pada tahun 2022, sedangkan untuk tahun 2023-2024 jumlah laka dan korban meninggal dunia stagnan.

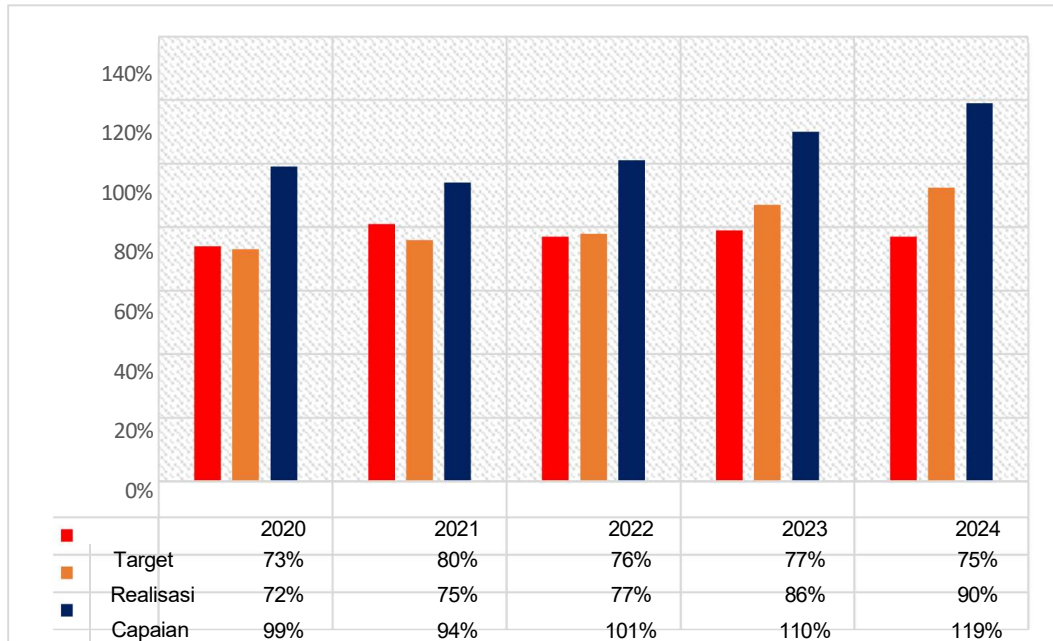


Grafik 3. Jumlah Laka dan Korban Meninggal Dunia 2020-2024

Polres Singkawang sudah melakukan beberapa upaya yang dapat menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban meninggal dunia dengan (1) menyelenggarakan operasi Lalu Lintas yang tematik, (2) menyelenggarakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli Lalu lintas, (3) melakukan kajian *blackspot* dan *trouble spot* kecelakaan lalu-lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan membangun komunitas di area tersebut; (4) melaksanakan giat penindakan pelanggaran secara selektif di daerah rawan kecelakaan lalu lintas, (5) penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi *Traffic Accident Analysis (TAA)*, (6) membangun sistem uji SIM yang berbasis pada kompetensi keselamatan, (7) sosialisasi dan kampanye tentang budaya tertib berlalu lintas, (8) melanjutkan program “Stop Pelanggaran, Kecelakaan dan Keselamatan untuk Kemanusiaan”, dan (9) koordinasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* untuk menangani permasalahan yang terjadi di jalan maupun kendaraan dan orang yang melintas yang dapat menyebabkan kecelakaan dan mensosialisasikan keselamatan lalu lintas.

Selain itu, peningkatan kinerja Indeks Harkamtibmas disebabkan karena kinerja *crime rate*, di mana jumlah kasus kejahatan yang terjadi meningkat namun tidak signifikan sebanyak 17,21%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sepanjang periode 2020-2024 Kota

Singkawang menjadi tidak aman. Hal ini didukung oleh banyaknya tindak kejahatan atau kasus hukum yang terjadi baik di lingkungan tempat tinggal ataupun tidak, serta yang dilakukan oleh orang terdekat, keluarga ataupun tidak.



Grafik 4. Jumlah Kasus Kejahatan Tahun 2020-2024

Secara umum, sepanjang periode 2020-2024 Polres Singkawang telah melakukan upaya terbaik dalam pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada tahun 2020-2024, Polri juga berperan dalam pengendalian pandemi *Covid-19* melalui penegakan protokol kesehatan dan dukungan pelaksanaan vaksinasi, pemulihan ekonomi nasional melalui pengamanan distribusi logistik dan bantuan sosial dan pengamanan perayaan natal dan tahun baru untuk pengawasan arus mudik dan mencegah kerumunan, serta pengamanan Pemilu, pengamanan Pilkada, Operasi Lilin, Operasi Ketupat, Operasi Zebra, Operasi Mantap Brata dan berbagai program pembangunan. Pada tahun 2023-2024, fokus utama Polres Singkawang dalam pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi mendukung program pemerintah dalam menjaga harga bahan pokok dan mencegah aksi spekulasi pasar, dan pemberantasan kejahatan siber, Narkoba, dan terorisme. Selain itu, Polres Singkawang juga telah menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* untuk mendukung penegakan hukum berlalu lintas berbasis teknologi.

Ketiga, Penegakan hukum secara berkeadilan mencerminkan kinerja Polri dalam menyelesaikan suatu tindak kejahatan atau kasus hukum. Kinerja ini dari 6 indikator kinerja yang menjadi pembentuk indeks Gakkum, di mana kinerja Indeks Gakkum telah mencapai target sepanjang periode 2020-2024.



Grafik 5. Indeks Penegakan Hukum Tahun 2020-2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Gakkum mendapatkan nilai melebihi target, demikian pula dengan peningkatan realisasi kinerja sepanjang periode 2020-2024. Secara umum, kinerja Polres Singkawang dalam bidang penegakan hukum menunjukkan hasil yang baik dengan rerata penyelesaian atau penanganan perkara tindak pidana atau kejahatan secara keseluruhan cenderung lebih banyak dibandingkan target yang ditetapkan, yaitu di atas 100% sepanjang periode 2020-2024. Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai macam upaya, di antaranya melakukan *Interview*, *Surveillance*, *Undercover*, *lidik online* dan *cyber patrol* yang hasilnya menjadi data pendukung yang dapat dijadikan landasan dan bahan informasi dalam rangka proses penyidikan lebih lanjut, memutus mata rantai dan mengungkap jaringan peredaran Narkoba, menyamakan persepsi dengan JPU terhadap perkara yang ditangani guna mempercepat penyelesaian perkara, kolaborasi dan kerja sama dengan

instansi.....

instansi/badan/lembaga penegak hukum di luar negeri terkait penanganan kejahatan ekonomi dan khusus yang bersifat transnasional. Keberhasilan kinerja penegakan hukum tidak terlepas dari penerapan prinsip kerja untuk, Responsif, Partnership, dan Solutif.

2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi organisasi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi dapat menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.

a. Potensi dan Permasalahan Internal

Hasil analisis kekuatan dari berbagai dimensi dapat dipaparkan dan dipetakan ke dalam susunan rantai nilai proses aktivitas utama (*core process*) Polri yang terdiri atas cegah dini, cegah, dan penindakan. Pada proses cegah dini, terdapat 3 (tiga) poin rangkuman kekuatan yang dimiliki oleh institusi Polda Kalbar. Pertama, sudah bakunya Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri sebagai panduan objektif kinerja Polri dalam penyimpangan. Kedua, penguatan atas budaya integritas, kejujuran dan kehormatan pada pelaksanaan setiap tugas kepolisian melalui Sasaran Strategis *Grand Strategy* Polri periode I (2025-2029). Ketiga, tingginya tingkat kebanggaan SDM Polres Singkawang terhadap institusi Polri dapat melahirkan loyalitas dan identitas organisasi yang memperkuat usaha pencegahan dini Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada proses cegah, terdapat satu poin rangkuman kekuatan yang dimiliki oleh Polda Kalbar, di mana terdapat 51 SDM Polres Singkawang yang bertugas membina karier di luar struktur Polri pada Kementerian/Lembaga/Pemda/Instansi/BUMN/Swasta yang dapat menjadi modal sosial Polri dalam memastikan kondusifitas Kamtibmas di Kota Singkawang.

Pada proses penindakan, terdapat 2 (dua) poin rangkuman kekuatan yang dimiliki oleh institusi Polri. Pertama, jaringan struktur organisasi Polres Singkawang yang tersebar di 5 Kecamatan memudahkan untuk koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum. Kedua, setiap fungsi dari proses penyelidikan, penyidikan dan penegakan hukum di Polres Singkawang sudah didukung oleh teknologi digital yang memudahkan Polri untuk bekerja secara efektif dan efisien.

1) analisis kelemahan internal berdasarkan rantai nilai

Beberapa analisis kelemahan dari berbagai dimensi dapat dipaparkan dan dipetakan ke dalam susunan rantai nilai proses aktivitas utama (*core process*) Polres Singkawang yang terdiri atas cegah dini, cegah, dan penindakan. Pada proses cegah dini terdapat satu poin rangkuman keberhasilan yang dimiliki oleh Polres Singkawang, sudah berstatus WBK sedangkan untuk WBBM belum mendapatkan predikat dari Menpan RB.

5 Polsek

Pada proses penindakan terdapat 3 (tiga) poin rangkuman kelemahan yang dimiliki oleh Polres Singkawang. Pertama, Budaya mekanistik merintangai keterbukaan saluran komunikasi dan transparansi arus informasi Polri, sehingga berpotensi menghambat proses penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum. Kedua, diperlukan penguatan pondasi penanganan perkara berbasis ilmiah (*scientific crime investigation*). Ketiga, penguatan ketegasan dan keadilan dalam penanganan perkara dinilai perlu ditingkatkan.

Selain itu, terdapat 4 (empat) poin rangkuman kelemahan Polri yang memiliki pengaruh terhadap ketiga proses aktivitas utama (*core process*) Polri. Pertama, belum berjalannya fungsi koordinasi dan kolaborasi pada kegiatan operasional Polres Singkawang lintas subsatker secara digital maupun secara teknis operasional, mulai dari fungsi pencegahan dini hingga ke penindakan. Kedua, belum tersedianya pengimplementasian sistem penghargaan dan hukuman berbasis risiko serta kinerja dan belum optimalnya standar kompetensi baku yang konsisten di setiap fungsi dan jenjang karir SDM Polres Singkawang.

Ketiga....

Ketiga, kuantitas dan kualitas SDM Polri dinilai belum selaras dengan beban kerja di lapangan, disertai dengan kurangnya perhatian dan keperdulian unsur pimpinan pada mekanisme Waskat anggotanya. Keempat, kurangnya dukungan saran dan prasarana peningkatan kompetensi personel, termasuk sarpras mandiri seperti *e-learning* dan *e-library*.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa poin kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a) kekuatan

- (1) sudah bakunya Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri;
- (2) dukungan pimpinan atas internalisasi nilai-nilai budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan;
- (3) tingginya tingkat kebanggaan personel terhadap instansi Polri.
- (4) postur kekuatan Polres Singkawang sebagai Kesatuan Induk Penuh, Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan Polsek sebagai simpul terdepan pelayanan Kamtibmas kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan kepadamasyarakat dengan penggelaran kekuatan dan lapis kemampuan Polri yang tergelar mulai tingkat Kota sampai tingkat kelurahan
- (5) meningkatnya penilaian Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (AKIP) Polres Singkawang dalam 4 tahun terakhir dengan kategori Pagu Sedang, yaitu tahun 2021 dengan nilai 72, tahun 2022 nilai 73,43, tahun 2023 nilai 72,5 dan tahun 2024 nilai 73,57 dengan meningkatnya nilai AKIP berpotensi tunjangan kinerja Polri akan meningkat.

b) kelemahan

- (1) tumpang tindih tugas dan fungsi di struktur internal Polri;
- (2) belum terbentuknya unit Satpolair dan Polsek kawasan Bandara Singkawang

(3). belum....

- (3) belum ada sistem dan data yang terintegrasi antar satuan kerja;
- (4) sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) yang belum optimal;
- (5) mekanisme transfer pengetahuan yang belum optimal dengan frekuensi rotasi personel yang tinggi;
- (6) kuantitas dan kualitas SDM Polres Singkawang belum selaras dengan beban kerja;
- (9) ketiadaan standar kompetensi baku dan konsisten di setiap fungsi dan jenjang karier anggota Polri; kurangnya perhatian unsur pimpinan pada mekanisme Waskat;
- (10) kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar satuan kerja;
- (11) belum tersedianya *MEPE* hingga ke satuan terkecil.

b. Potensi dan Permasalahan Eksternal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi Polri. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai fakta eksternal, di antaranya sosial/demografi, teknologi, ekonomi, dan politik. Potensi dan permasalahan eksternal Polri dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) dimensi sosial/demografi

dalam dimensi sosial/demografi, terdapat 3 (tiga) fenomena kunci yang memiliki dampak terhadap organisasi Polri, yaitu:

a) demografi

Proyeksi dan distribusi penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten/Kota, 2020-2035

Kabupaten/Kota	2020	2025	2030	2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Singkawang	234,16	253,81	271,99	288,79

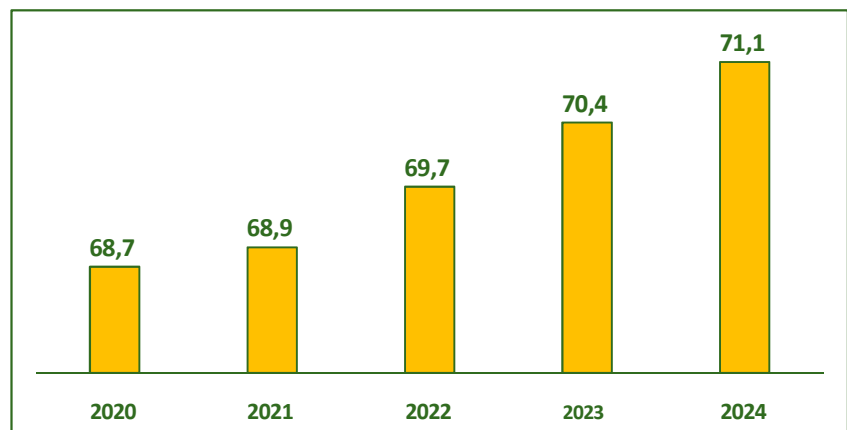
Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota 2020- 2035. Hasil Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan.....

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota 2020-2035, untuk tahun 2025-2030 terdapat penambahan jumlah penduduk sebesar 288,79 jiwa atau 5,3%. Penambahan jumlah penduduk ini adalah potensi peluang sekaligus ancaman bagi Kota Singkawang

b) tren positif Indeks Pembangunan Manusia Kalbar

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kinerja pembangunan yang dibentuk melalui tiga



Sumber: Perkembangan IPM Kota Singkawang 2020–2024

dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. IPM digunakan untuk mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Dengan demikian, diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk. Pencapaian pembangunan manusia Polres Singkawang pada tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang sangat berarti.

IPM Kota Singkawang masih tergolong rendah. Oleh karena itu, Kota Singkawang membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan masukan guna mencapai peningkatan IPM yang signifikan. Angka IPM Kota Singkawang pada tahun 2024 mencapai 71,19, meningkat 0,72 poin (1,02%)

dibandingkan.....

dibandingkan tahun sebelumnya (70,47). Peningkatan ini meliputi tiga dimensi utama IPM: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Bahwa selama 2020-2024, IPM Kota Singkawang rata-rata meningkat sebesar 0,87 persen per tahun.

Meski IPM Kota Singkawang telah mengalami pertumbuhan, perlu diperhatikan juga laju pertumbuhannya masih di bawah rata-rata laju pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Polri, mengingat angka IPM berkaitan dengan kualitas SDM yang perlu direkrut untuk mengantisipasi kebutuhan organisasi di masa depan.

Hal lain terkait kualitas pembangunan manusia Indonesia yang perlu diperhatikan oleh Polri adalah kehadiran fenomena multi generasi selama periode 2025-2029. Pada periode tersebut terdapat 3 (tiga) generasi yang perlu menjadi perhatian dalam angkatan kerja di Indonesia, yaitu Generasi X, Generasi Y (milenial), dan Generasi Z. Setiap generasi memiliki karakteristik kekuatan dan kelemahannya masing-masing yang harus dipertimbangkan Polri dalam siklus pengelolaan SDM Polri.

Berdasarkan riset dari *Barclays, Universitas Liverpool*, terdapat sejumlah perbedaan karakteristik dari setiap generasi. Adapun karakteristik yang perlu dipertimbangkan oleh Polri adalah sebagai berikut:

(1) generasi X lahir pada tahun 1965-1980. Sikap Generasi X cenderung lebih fleksibel dan terbuka terhadap peluang karier di berbagai organisasi ataupun industri. Generasi ini cenderung membangun portofolio keterampilan dan juga pengalaman dari berbagai tempat kerja. Sehingga mereka cenderung memiliki karier yang mencakup beberapa posisi di berbagai organisasi, membangun kompetensi, dan jaringan secara luas;

(2) generasi.....

- (2) generasi Y (milenial) lahir pada tahun 1981-1996. Generasi Y cenderung lebih tertarik untuk menciptakan sesuatu yang baru menggunakan teknologi digital, seperti mendirikan *start-up* atau memanfaatkan media digital untuk pemasaran. Tumbuh di era perkembangan internet dan teknologi digital, generasi ini cukup adaptif atas teknologi baru. Generasi ini dikenal dengan keberaniannya dalam berinovasi melalui pemanfaatan teknologi digital;
- (3) generasi Z lahir pada tahun 1997-2012. Generasi Z sangat adaptif terhadap teknologi dan mampu menangani berbagai tugas dan peran dalam waktu bersamaan. Generasi ini terbiasa dengan teknologi yang memungkinkan mereka untuk mengerjakan beberapa tugas sekaligus. Generasi Z cenderung memiliki banyak minat, mampu beradaptasi dengan cepat, dan tidak ragu untuk berpindah karier demi pertumbuhan dan keseimbangan kerja dan hidup yang lebih baik.

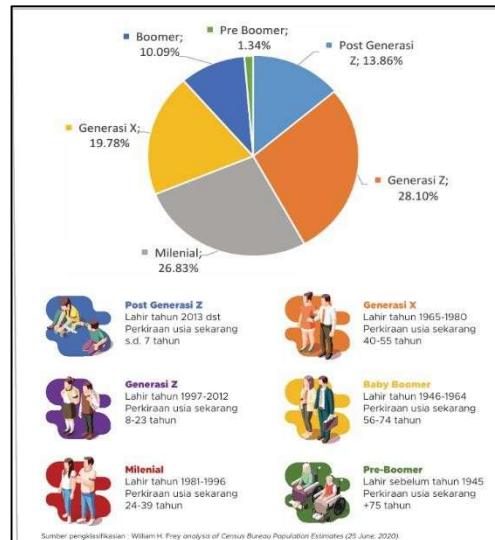
c) fenomena generasi *strawberry*

Terminologi generasi *strawberry* seringkali diatributkan kepada mereka yang mudah menyerah atau kurang memiliki keuletan dalam menghadapi tantangan. Mereka dianalogikan dengan buah *strawberry* karena karakteristik mereka yang lembut dan rentan terhadap tekanan sebagaimana buah *strawberry* yang mudah memar.

Karakteristik generasi *strawberry* sudah mulai terdeteksi di antara anggota baru Polri. Salah satu contoh adalah munculnya fenomena pengunduran diri anggota baru Polri hanya karena alasan penempatan di luar daerah. Mengingat semakin tingginya dinamika ketidakpastian akibat disrupsi teknologi yang dapat mengarah pada

keengganan.....

keengganan untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan, maka Polri membutuhkan pendekatan untuk mengatasi kerentanan mental generasi *strawberry*.



Sifat kurangnya daya juang dapat dialami oleh siapa pun, namun karakteristik generasi *strawberry* umumnya ditemukan pada sebagian Generasi Z. Mengingat komposisi Generasi Z yang

melingkupi 27,9% dari total jumlah penduduk Kota Singkawang berdasarkan sensus 2020, maka kelompok penduduk ini perlu menjadi perhatian Polri, baik dalam konteks sebagai angkatan kerja calon personel Polri ataupun sebagai masyarakat yang harus dilayani oleh Polri.

2) dimensi teknologi

dalam dimensi teknologi, terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap kinerja Polri, yaitu:

a) tren teknologi digital dan potensi kejahatan siber

McKinsey memperkirakan bahwa hingga tahun 2025, sekitar 50% pekerjaan harian telah dapat diotomasi dan lebih dari 75% data organisasi akan tersedia di *Cloud Computing*. Hal ini menandakan bahwa kecanggihan teknologi diperkirakan dapat memindahkan beban kerja keseharian manusia kepada mesin hingga 50%. Dari perspektif positif kondisi ini dapat membuat organisasi bekerja lebih efisien dan efektif, sedangkan dari perspektif negatif kondisi ini dapat menandakan bahwa banyak lapangan pekerjaan yang hilang bagi manusia. Dengan demikian, Polri harus segera mempersiapkan diri untuk

menyambut.....

menyambut potensi dari dampak positif dan/atau dampak negatif perkembangan teknologi tersebut secara proporsional.

McKinsey juga memperkirakan pada tahun 2027, 10% GDP global akan berkorelasi dengan teknologi *blockchain*, dengan proyeksi Indonesia sebagai 4 besar perekonomian dunia di tahun 2030. Hal ini menandakan adanya potensi besar bahwa sebagian kontribusi teknologi *blockchain* tersebut akan berkorelasi dengan GDP Indonesia. Maka dari itu, penting bagi Polri untuk mulai mempelajari segala potensi pemanfaatan dan risiko terkait teknologi *blockchain* bagi efektivitas dan efisiensi operasional Polri.

Menurut *European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS)*, pada tahun 2030 diperkirakan 125 miliar perangkat akan terhubung ke internet dengan 75% penduduk dunia telah memiliki konektivitas *mobile* dan 60% penduduk dunia telah terpapar akses internet *broadband*. Dunia juga diperkirakan akan mengalami *hyper-connectivity* baik secara fisik ataupun digital. Maka Polri perlu memastikan kembali tingkat kematangan digitalisasi internal instansi Polri.

McKinsey juga memperkirakan sampai tahun 2030, 80% populasi global telah terkoneksi dengan internet 5G. Artinya masyarakat akan semakin leluasa untuk memanfaatkan internet demi kepentingannya. Maka dari itu, Polri perlu bersiap sebaik mungkin dengan beragam kemajuan teknologi digital guna menghadapi berbagai bentuk kejahatan di ruang siber yang mungkin terjadi. Ini berarti, penting bagi Polri untuk semakin memperhatikan variabel keamanan siber.

Keamanan siber (*cyber*) merupakan tindakan perlindungan aset digital dari peristiwa berbahaya seperti kesalahan manusia dan teknis, kejahatan individu dan pengguna yang tidak sah. Keamanan informasi berguna

mencegah.....

mencegah akses, penggunaan, pengungkapan, modifikasi, atau penghancuran informasi yang tidak sah dalam bentuk apa pun pada sistem TI. Risiko siber pihak ketiga adalah masalah unik karena sebagian besar organisasi menyadari ancaman signifikan yang ditimbulkannya, namun banyak yang gagal menerapkan mitigasi risiko yang memadai. Organisasi yang siap dalam menghadapi risiko di ruang siber, memiliki keterhubungan yang kuat antara adanya kesadaran (*awareness*) akan masalah dan kemampuan untuk mengelola dan mengatasinya.

Penggunaan internet di Kota Singkawang berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2024 secara nasional berkontribusi sebesar 2,00% sedangkan secara pulau Kalimantan berkontribusi 33,00% atau tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Kalbar.

- b) perkembangan teknologi digital bagi organisasi sektor publik

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi organisasi sektor publik untuk melakukan transformasi digital dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Inti dari transformasi digital adalah bergerak dari aplikasi *ad-hoc* digital menuju merancang dan mengimplementasikan teknologi digital di seluruh organisasi. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* dalam risalah terkait *digital government*, menjabarkan tentang bagaimana pemerintahan suatu negara dapat secara optimal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk menegakkan tata kelola organisasi yang baik.

Pada prinsipnya transformasi digital menekankan bahwa organisasi publik mesti berupaya memberikan pelayanan yang mampu beradaptasi sesuai kebutuhan masyarakat. Implementasi transformasi digital pada pemerintahan perlu mempertimbangkan tujuan publik,

keamanan dan privasi data (*data security and privacy*), aksesibilitas layanan digital (*digital service accessibility*) dan literasi digital publik (*public digital literacy*).

Kepercayaan publik (*public trust*) merupakan inti dari transformasi digital pada sektor publik, baik sebagai pendorong maupun efek dari transformasi tersebut. Teknologi digital merupakan penggerak strategis (*strategic driver*) untuk menciptakan sektor publik yang terbuka, inovatif, partisipatif dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Transformasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusivitas sosial dan akuntabilitas pemerintah, serta menyatukan kontribusi organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Teknologi digital yang terus mengalami perkembangan signifikan, menuntut Polri untuk secara dinamis merancang dan mengatur portofolio inisiatif digitalnya. Tata kelola transformasi digital yang efektif diharapkan mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan pemangku kepentingan organisasi, sehingga transformasi digital dapat memberikan dampak bagi setiap *stakeholder*. Terdapat beberapa prinsip utama kesuksesan transformasi digital yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan transformasi digital pada sektor publik, seperti:

- (1) sentralisasi informasi bersama, memusatkan informasi tentang inisiatif digital;
- (2) desentralisasi tata kelola inisiatif digital dari waktu ke waktu, seiring perkembangan digital, memungkinkan tata kelola inisiatif terpusat menjadi desentralisasi;
- (3) desentralisasi ide dan sentralisasi evaluasi ide desentralisasi ide akan meningkatkan munculnya ide-ide kreatif. namun, evaluasi atas ide-ide tersebut harus disentralisasikan. Sentralisasi ini berfungsi untuk memastikan adanya optimalisasi sinergi dari setiap ide yang lahir dalam proses transformasi;

(4) penilaian....

- (4) penilaian *Key Performance Indicator (KPI)* memastikan penggunaan KPI untuk mengukur dampak *riil* yang ingin dicapai setiap inisiatif. Penetapan KPI bergantung pada prioritas strategis mencakup visi, kesuksesan, dan tujuan implementasi organisasi di masa depan;
- (5) fokus pada kompatibilitas, konsistensi, dan integrasi berkelanjutan memastikan kompatibilitas data, konsistensi teknis, dan integrasi berkelanjutan dari inisiatif baru dengan sistem yang ada. memastikan inisiatif digital baru terintegrasi dalam aturan, sistem, dan kemampuan TI organisasi yang ada;
- (6) penerapan *mapping system* “sesuai dengan tujuan” menerapkan sistem pemetaan “sesuai dengan tujuan” yang mengenali potensi nilai dan tingkat kelayakan untuk setiap inisiatif;
- (7) analisis skenario evaluasi skenario yang berbeda secara proaktif dalam mengelola inisiatif digital menuju dampak skala penuh.

Transformasi digital yang dilakukan pada sektor publik memungkinkan Polri untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam penciptaan nilai publik. Salah satunya dengan percepatan pengambilan keputusan berbasis data dan informasi secara *real-time* dan akurat. Dalam dimensi data, terdapat sejumlah fase perkembangan data yang harus dikelola oleh Polri, yaitu (1) fase pengumpulan data, (2) penyimpanan data, (3) pengamanan dan pengolahan data (4) fase pembagian, kurasi, dan penerbitan data, serta yang terakhir adalah (5) fase penggunaan dan pemanfaatan kembali data. Dengan melakukan pengelolaan data sesuai fase perkembangan tersebut, maka Polri dapat memperoleh manfaat berupa:

(1) pengambilan....

- (1) pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif;
- (2) peningkatan pengalaman bagi seluruh *stakeholder* saat menerima layanan Polri;
- (3) efisiensi administrasi bagi kinerja Polri;
- (4) peningkatan perlindungan data dan privasi; dan
- (5) memperkuat mitigasi risiko terkait potensi penyalahgunaan data dan sistem informasi.

3) dimensi ekonomi

dalam dimensi ekonomi, terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap kinerja SDM Polres Singkawang, yaitu:

a) tantangan perekonomian global

terdapat beberapa *megatrend* global yang berpotensi untuk mempengaruhi kinerja Polri dalam menghadirkan keamanan dan ketertiban Kota Singkawang, yaitu:

(1) arus demografi global

Bonus demografi merupakan kondisi dimana jumlah penduduk usia nonproduktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif relatif sedikit "sehingga memungkinkan penduduk usia produktif untuk menabung, berinvestasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi". Bonus demografi terjadi dimana rasio ketergantungan kurang dari 50 hanya terjadi satu kali dalam sejarah setiap bangsa/wilayah. Umumnya bonus demografi diikuti oleh peningkatan proporsi penduduk lanjut usia.

Dinamika kependudukan adalah perubahan struktur penduduk yang meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini berubah-ubah disebabkan oleh proses demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Kalimantan Barat diperkirakan mencapai bonus demografi pada tahun 2025 dan terus berlanjut pada tahun 2030 dan pada tahun 2035 diperkirakan meningkat karena

Terjadi....

terjadi peningkatan cukup tajam pada penduduk Lansia.

Jika bonus demografi tidak diantisipasi melalui kebijakan, program dan kegiatan yang tepat maka berdampak pada angka pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas serta jumlah lansia akan meningkat, tidak hanya itu saja kebutuhan anggaran untuk fasilitas pendidikan, pelatihan dan kesehatan akan meningkat.

- b) dilematisasi Kota Singkawang Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kehancuran Ekologis

Kota Singkawang terus mengalami kerusakan lingkungan yang semakin masif, ditandai oleh pencemaran sungai, deforestasi besar-besaran, dan degradasi ekosistem. Di balik semua ini, berdiri Pemerintah Provinsi Kalbar yang tampak lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi ketimbang menjaga kelangsungan ruang hidup rakyatnya. Komitmen terhadap lingkungan sejauh ini hanya hadir dalam bentuk jargon administratif tanpa dibarengi kebijakan konkret dan tindakan nyata.

- c) dinamika kelas menengah di Kota Singkawang

BPS juga mencatat status pekerjaan utama yang diemban oleh para pekerja. Mayoritas penduduk yang bekerja di Kalbar berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, dengan persentase mencapai 40,58 persen. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja berada dalam hubungan kerja formal dan berstruktur, meskipun mungkin dalam skala usaha kecil atau menengah. Namun, ada sejumlah kecil penduduk yang berstatus sebagai pekerja yang berusaha dengan bantuan buruh tetap dan dibayar. Golongan ini hanya mencakup 3,40 persen dari tenaga kerja di Kota Singkawang.

Fenomena ini memberikan gambaran bahwa formalitas hubungan kerja di Kalbar masih relatif terbatas, mengingat jumlah pekerja mandiri dan mereka yang bekerja dengan bantuan buruh tetap masih sangat rendah. Salah satu alasannya adalah karakteristik sektor primer di Kalbar yang cenderung mempekerjakan tenaga kerja dengan hubungan yang lebih informal. Jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, maka perlu dilakukan upaya untuk memperluas peluang kerja yang lebih terstruktur dan formal di berbagai sektor, khususnya di luar sektor primer.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kota Singkawang dalam sektor ketenagakerjaan adalah tingkat pendidikan yang rendah pada sebagian besar tenaga kerjanya. BPS mencatat bahwa tahun 2024, sebagian besar tenaga kerja di Kota Singkawang hanya memiliki pendidikan SD ke bawah. Kelompok ini mencakup sekitar 43,10 persen dari total tenaga kerja yang bekerja di provinsi tersebut. Di sisi lain, tenaga kerja dengan pendidikan Diploma I, II, atau III tercatat sebagai yang paling sedikit, hanya sebesar 2,70 persen.

Rendahnya tingkat pendidikan ini tidak hanya berdampak pada kapasitas dan keterampilan pekerja tetapi juga membatasi pilihan mereka dalam mencari pekerjaan dengan upah lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Pendidikan yang rendah membuat mereka kurang siap menghadapi tantangan di sektor-sektor yang lebih maju

seperti industri teknologi, kesehatan, dan manufaktur. Dengan kondisi ini, perlu ada perbaikan besar dalam akses pendidikan dan pelatihan vokasi bagi penduduk, terutama di wilayah pedesaan yang mungkin masih terbatas aksesnya terhadap fasilitas pendidikan.

B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kepolisian Resor Singkawang menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 5 (lima) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target

No. SS	Sasaran Strategis	No. IK SS	Indikator Kinerja Impact, Utama, dan Penunjang	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang terkendali, melalui kepolisian yang berintegritas, modern, dan akuntabel	IK SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Indeks Kamtibmas) Kota Singkawang	4,00	4,02	4,08	4,10	4,18
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif	IK SS 1	Indeks Harkamtibmas Polres Singkawang	2,72	2,75	2,79	2,77	2,83

No. SS	Sasaran Strategis	No. IK SS	Indikator Kinerja Impact, Utama, dan Penunjang	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029

SS2	Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan	IK SS 2	Indeks Gakkum Polres Singkawang	3,49	3,51	3,53	3,52	3,54
SS3	Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Singkawang yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh	IK SS 3	Indeks Profesionalitas SDM Polres Singkawang	68,59 (2,85)	68,88 (2,89)	69,06 (2,90)	68,86 (2,80)	58,94 (2,89)
		IK SS 4	Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polres Singkawang	76 (2,86)	76 (2,86)	76 (2,85)	76 (2,86)	76 (2,86)
SS4	Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern	IK SS 5	Indeks SPBE	2	2	2	2,3	2,5
		IK SS 6	Tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i>	41,70 (1,67)	43,58 (1,70)	43,13 (1,70)	42,79 (1,70)	43,10 (1,70)
		IK SS 8	Indeks kualitas data	4	4	4	4	4
SS5	Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel	IK SS 9	Nilai SAKIP	72,50 (3,38)	72,18 (3,36)	72,24 (3,36)	72,30 (3,37)	72,24 (3,36)
		IK SS 12	Indeks Reformasi Birokrasi	84,09 (3,96)	84,33 (3,97)	81,64 (3,87)	83,35 (3,93)	83,10 (3,92)
		IK SS 13	Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri	85 (4,6)	85 (4,6)	86 (4,6)	86 (4,6)	87 (4,6)
		IK SS 14	Nilai Kinerja Anggaran	97,25 (4,38)	97,9 (4,48)	97,81 (4,47)	97,65 (4,46)	97,78 (4,46)
		IK SS 15	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengaduan Polri	100 (5)	100 (5)	100 (5)	100 (5)	100 (5)
		IK SS 16	Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri	100% (5)	100% (5)	100% (5)	100% (5)	100% (5)

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) Program di lingkungan Kepolisian Resor Singkawang, yaitu sebagai berikut:

- a. program Dukungan Manajemen;
- b. program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polres Singkawang;
- c. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- d. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana terlampir.

C. PENUTUP

Rencana Strategis Kepolisian Resor Singkawang Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah Polres Singkawang, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polres Singkawang dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polri. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh personel Polres Singkawang sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polres Singkawang Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban nasional dapat terpelihara.

Terdapat lima sasaran strategis Polres Singkawang dalam mencapai tujuan Polri dan mewujudkan Visi dan Misi Polri, yaitu:

1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
2. Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
3. Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Singkawang yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh;
4. Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern;
5. Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.

Kelima sasaran strategis Polres Singkawang ini dicapai dengan masing-masing arah kebijakan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka dirumuskan strategi pembangunan Polres Singkawang yang disertai dengan langkah- langkah untuk melaksanakannya. Pencapaian sasaran strategis Polri diukur dengan indikator kinerja yang disertai dengan target kinerja dan kerangka pendanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) program di lingkungan Kepolisian Resor Singkawang, yaitu sebagai berikut:

1. program Dukungan Manajemen;
2. program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polres Singkawang;
3. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
4. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator disertai target, alokasi pendanaan dan unit organisasi pelaksana dituangkan dalam Lampiran B tentang Matriks Kinerja Kepolisian Resor Singkawang dan Lampiran C tentang Matriks Pendanaan Kepolisian Resor Singkawang. Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polri. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Polres Singkawang sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polres Singkawang Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga keamanan dan ketertiban nasional dapat terpelihara.

1. Kaidah Pelaksana

- a. mengutamakan sistem pelayanan publik kepolisian yang prima dengan menghadirkan negara (Polri) yang adaptif ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis menuju *citizen-centric policing*;
- c. mengedepankan strategi Polmas, serta perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi responsif dalam pencegahan kejahatan serta meminimalisir jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
- d. selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya serta memberdayakan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

2. Autentikasi dan distribusi

- a. autentikasi Renstra Polres Singkawang berikut merupakan jabaran dari Renstra Polri, yang telah disahkan oleh Kapolda sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;
- b. distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh Subsatker jajaran Polres Singkawang untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : 25 September 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG POLDA KALBAR